

**KEBERDAYAAN PETERNAK
DI PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI POLITIK**

Nugraha Setiawan



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2006**

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan kajian kritis terhadap kondisi peternak yang pada umumnya berdomisili di pedesaan dalam kondisi serba terbatas baik dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, maupun politik. Keterbatasan tersebut pada akhirnya membuat mereka masih berada pada keadaan tidak berdaya menghadapi dinamika kehidupan.

Ketidakterdayaan petani termasuk di dalamnya para peternak dapat ditinjau dari beberapa perspektif keilmuan, antara lain antropologi, ekonomi, dan sosiologi. Dalam kajian sosiologi pun, banyak teori yang bisa dipakai untuk memahami ketidakberdayaan masyarakat pedesaan yang sebagian besar terdiri atas petani dan peternak.

Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini memakai pendekatan sosiologi yang berparadigma “fakta sosial”, artinya masyarakat dilihat sebagai sebuah makrostruktur. Sementara untuk memahami fenomena yang ada dilakukan dengan meminjam teori Foucault tentang kekuasaan. Dalam pemahaman Foucault, kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang imanen dalam masyarakat.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui mengapa peternak sebagai bagian dari masyarakat pedesaan dalam keadaan yang tidak berdaya, walaupun pembangunan yang diarahkan ke pedesaan telah sangat lama berlangsung.

Diharapkan pula dengan diketahuinya duduk persoalan dari masalah di atas dapat dicari alternatif pemecahannya.

Apa yang tertuang dalam tulisan ini, hanya merupakan bagian kecil dari pengkajian yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri mengapa hingga saat ini para petani termasuk peternak yang sebagian besar mendiami kawasan pedesaan, kelihatannya masih dalam keadaan terpuruk dan tidak berdaya menahan tekanan-tekanan dari lingkungan eksternalnya. Namun tentu saja, penulis berharap ada manfaat yang dapat dipetik dari tulisan ini.

Jatinangor, Maret 2006

Penulis,
Nugraha Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	1
II PENDEKATAN ANALISIS	6
III PETERNAK SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT PEDESAAN	9
IV RELASI KEKUASAAN ANTARA MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN	14
V PETERNAK SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN	18
VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	22
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia masih berada di pedesaan, dan sebagian besar dari penduduk pedesaan bermata pencaharian di sektor pertanian termasuk di dalamnya peternakan. Di Jawa Barat sebagai propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, berdasarkan hasil Sensus Penduduk terakhir, angkatan kerja yang bekerja di sektor peternakan ada 161.926 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 130.097 orang bertempat tinggal di daerah pedesaan, sedangkan yang tinggal di perkotaan hanya 31.829 orang (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2001). Berdasarkan data di atas dapat dihitung, peternak yang berdomisili di pedesaan proporsinya mencapai angka 80,3 persen.

Dalam menghadapi era globalisasi serta perdagangan bebas saat ini, baik itu di kawasan Asean (AFTA) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2003, maupun pada kawasan yang lebih luas, Asia Pasifik (APEC) yang dicanangkan mulai berlaku paling lambat tahun 2020, maka mau tidak mau baik langsung maupun tidak langsung para peternak akan berhadapan dengan sistem ekonomi pasar bebas, sehingga mereka yang tidak siap akan kalah dalam proses persaingan yang semakin ketat.

Di sektor peternakan dan pertanian pada umumnya telah dilakukan antisipasi untuk menghadapi persaingan di pasar bebas tersebut, misalnya arah kebijakan dan pembinaan telah diorientasikan pada upaya untuk membentuk petani peternak yang berorientasi pasar. Didirikannya badan yang mengurus agribisnis dan berbagai bentuk pembinaan lainnya seperti kegiatan penyuluhan yang diarahkan untuk membentuk petani peternak profesional, merupakan sebagian upaya untuk membentuk petani peternak yang diharapkan mampu bertahan dan berkembang dalam suasana persaingan di pasar bebas.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan yang di dalamnya termasuk petani peternak, antara lain dengan mengembangkan lembaga-lembaga yang sudah mengakar di masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk LM3 (Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat), yaitu suatu upaya pengembangan masyarakat pedesaan yang berbasis pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Tujuan dari program tersebut adalah memberdayakan Pondok Pesantren dalam pengembangan kegiatan agribisnis masyarakat di sekitar Pondok Pesantren di wilayah pedesaan, dan Pondok Pesantren diharapkan dapat berperan sebagai “inti” pada program pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan (Deliveri, 1998).

Namun demikian, keberhasilan para peternak dalam menghadapi realitas usahanya, selain tergantung pada aspek

kelembagaan yang dikembangkan oleh pemerintah, juga sangat dipengaruhi aspek individu peternak serta pengaruh dari sistem dan struktur sosial masyarakat. Misalnya, dalam penerapan sistem agribisnis peternakan akan sangat bergantung pada tingkat pemahaman peternak tentang sistem agribisnis dan karakteristik sosial budaya seperti penolakan atau penerimaan mereka terhadap nilai-nilai kemodernan (Yunasaf, dkk. 1998).

Sebetulnya, upaya pemberdayaan masyarakat petani peternak di pedesaan sudah dilakukan sejak lama. Dalam empat dekade terakhir pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan pembangunan pedesaan dan pembangunan pertanian. Secara ideal tujuan pembangunan tersebut diarahkan untuk mendukung ekonomi rakyat di pedesaan, namun pada pelaksanaannya proses pembangunan itu sering tidak sesuai dengan tujuan idealnya.

Mubyarto (1990) telah lama mensinyalir bahwa ketidakberhasilan pembangunan pedesaan disebabkan adanya distorsi akibat “politik beras” dalam pembangunan ekonomi rakyat di wilayah pedesaan. Ukuran-ukuran keberhasilan pertanian menjadi berorientasi pada peningkatan produksi, bukannya pada perubahan struktur yang dapat memberdayakan masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu, pada proses pembangunan tersebut telah terjadi bias akibat main stream yang terlalu berorientasi pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi, sehingga orientasi pada sektor industri tetap lebih dominan.

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Tjondronegoro (1990) yang menyatakan, karena tujuan pembangunan pertanian pada awalnya diarahkan untuk meningkatkan produksi beras, dan hal itu dapat dilakukan tanpa harus mengubah struktur sosial masyarakat pedesaan, siapa atau golongan mana yang diuntungkan dengan adanya pembangunan pertanian tersebut menjadi suatu hal yang tidak terlalu dipermasalahkan, yang penting tujuan produksi tercapai.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dikatakan, hingga saat ini masyarakat pedesaan termasuk di dalamnya para petani peternak yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan masih berada dalam kondisi kurang diberdayakan, bahkan masih tetap dalam keadaan tidak berdaya, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Tulisan ini akan menelusuri, mengapa para peternak serta umumnya masyarakat di pedesaan masih dalam keadaan tidak berdaya, padahal kebijakan-kebijakan pembangunan yang berorientasi ke pedesaan sudah sejak lama diimplementasikan oleh pemerintah.

Pengkajian akan dilakukan melalui pendekatan sosiologi politik. Pemahaman akan fenomena keberdayaan peternak di pedesaan, didekati dengan paradigma “fakta sosial” yang memandang hidup bermasyarakat dalam sebuah makrostruktur

(Ritzer, 1980). Kemudian dilakukan analisis dengan memakai teori kekuasaan Foucault, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat kekuasaan bersifat imanen (Hewitt, 1991).

BAB II

PENDEKATAN ANALISIS

Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya, yaitu bentuk pengorganisasian, peraturan, hirarki kekuasaan, peranan-peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai pranata-pranata sosial, merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun mempengaruhi individu tersebut.

Sejak kecil individu-individu sudah masuk dalam perangkat daya paksa masyarakat. Mereka dengan segera akan belajar, bahwa tidak boleh berbuat sekehendaknya melainkan harus selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan masyarakat di sekelilingnya. Dengan demikian, dalam kehidupan ini ada kemauan umum yang harus diikuti di atas keinginan-keinginan individual.

Tulisan Emile Durkheim yang menerapkan paradigma fakta sosial menekankan corak obyektif hidup bermasyarakat (Veeger, dkk. 1992). Hidup sosial manusia adalah kenyataan yang berdiri sendiri, yang tidak mungkin dapat dipahami hanya berdasarkan ciri-ciri personal orang yang bersangkutan. Kehidupan sosial memiliki hukumnya, dampaknya, dan akibatnya sendiri. Maka dari itu sosiologi tidak dapat

dikembalikan kepada psikologi, walaupun dalam kenyataan ada fakta psikis, tetapi juga ada fakta sosial. Durkheim tidak pula menyangkal bahwa hidup manusia yang bersifat tunggal dan utuh ikut ditentukan oleh ciri-ciri personal. Namun demikian, dia juga menegaskan bahwa kesosialan hidup merupakan unsur otonom yang setidaknya sama nyata seperti keindividualannya.

Hirarki kekuasaan sebagai sebuah fakta sosial, menurut Foucault terjelma karena adanya relasi-relasi kekuatan (*force relations*), adanya bentuk-bentuk kekuasaan antara sumber dan sasaran kekuasaan (*the body*), serta sasaran kekuasaan (*the social body*). Fokus analisis dari pendekatan Foucault adalah pada *force relations*, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji peranan dan dampak dari kekuasaan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada perspektif ini, relasi kekuatan berada pada keadaan yang mobil, artinya bahwa relasi kekuatannya bisa berubah-ubah tergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi sasaran kekuasaan, namun kekuasaannya itu sendiri akan tetap ada dan tidak bisa dihindari atau dilenyapkan (Hewitt, 1991).

Pengkajian pada makalah ini akan menempatkan peternak sebagai bagian dari masyarakat pedesaan sebagai sasaran kekuasaan, dan yang menjadi penguasa adalah masyarakat atau institusi lain di luar pedesaan. Bentuk-bentuk kekuasaan antara penguasa dan sasaran kekuasaan dapat dalam

bentuk penguasaan bidang politik, informasi, ekonomi, perdagangan, ataupun yang lainnya, sehingga analisis dapat diarahkan untuk mengkaji peranan dan dampak kekuasaan tersebut.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui mengapa peternak sebagai bagian dari masyarakat pedesaan dalam keadaan yang tidak berdaya, walaupun pembangunan yang diarahkan ke pedesaan telah lama berlangsung. Diharapkan pula dengan diketahuinya duduk persoalan masalah di atas dapat dicari alternatif pemecahannya.

BAB III

PETERNAK SEBAGAI ANGGOTA

MASYARAKAT PEDESAAN

Masyarakat pedesaan di Indonesia bisa dikatakan sebagai masyarakat petani, dan di dalamnya termasuk mereka yang berkecimpung di bidang peternakan. Walaupun telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam sektor pekerjaan, basis utamanya masih didominasi oleh kegiatan pertanian (Setiawan, 2002). Masyarakat pedesaan yang agraris sering digambarkan sebagai masyarakat dengan budaya tertutup, berbudaya homogen, serta adanya dominasi ikatan tradisional dengan struktur supra desa yang bersifat feodal dan kolonial (Kuntowijoyo, 1993).

Menurut Kingsley Davis, kebudayaan mencakup segenap cara-cara berpikir dan bertindak laku yang timbul karena terjadinya interaksi, bukan karena warisan yang berdasarkan keturunan (lihat Soekanto, 2003). Dalam pengertian ini, kebudayaan akan selalu dalam kondisi dinamis, disebabkan oleh adanya hubungan antara manusia dengan manusia lainnya atau antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Adanya pandangan bahwa masyarakat pedesaan merupakan masyarakat tradisional yang konservatif, menurut Long (1992) telah menyebabkan adanya arus pemikiran yang

menyatakan bahwa hal itu merupakan penghambat pembangunan nasional. Jadi, dalam konsep pemikiran tersebut bisa diartikan bahwa budaya masyarakat pedesaanlah yang menyebabkan terjadinya stagnasi pembangunan.

Terhadap pandangan di atas telah lama terjadi perdebatan, karena ternyata ada juga yang memiliki pemikiran, bahwa sebetulnya kawasan pedesaanlah yang mendukung perkembangan kota serta pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam pemikiran ini terbesit optimisme, dan bahwa konservativisme masyarakat pedesaan tersebut sebetulnya bukan merupakan masalah jika betul-betul berkehendak untuk membangun masyarakat pedesaan. Argumentasinya adalah bahwa budaya yang disebut sebagai penghambat itu justru dibentuk oleh kekuatan eksternal yang dengan sengaja semakin dikukuhkan. Dengan demikian, jika ingin berhasil membangun masyarakat di pedesaan, maka jangan menganggap konservativisme mereka sebagai suatu penghambat, apalagi dengan sengaja mereproduksinya.

Secara historis pembentukan budaya petani seperti digambarkan oleh mereka yang sependapat dengan arus pemikiran pesimis, sebetulnya merupakan dampak dari adanya penindasan (*oppression*) dari luar. Pada masa feodalisme, golongan petani di pedesaan telah dipaksa untuk terus menerus memproduksi oleh golongan feodal kota dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa memberi imbalan

yang cukup. Demikian pula pada zaman kolonial dengan sistem kapitalismenya, ternyata telah mengeksploitasi mereka tanpa memberi keuntungan yang memadai bagi para petani dan masyarakat pedesaan lainnya (Soetrisno, 1983).

Keadaan seperti digambarkan di atas ternyata terus berlangsung hingga setelah zaman kemerdekaan. Kartodirdjo (1979) mensinyalir bahwa revolusi hijau telah berdampak pada adanya kecenderungan ke arah polarisasi di beberapa daerah, dan kondisi demikian telah semakin menekan kehidupan para petani kecil. Bahkan, tekanan-tekanan tersebut dirasakan pula oleh anggota masyarakat pedesaan lainnya, termasuk para peternak yang sebagian besar mendiami wilayah pedesaan.

Di sisi lain, Lubis (1990) melihat bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan sebetulnya tidak ditujukan untuk membina petani atau masyarakat pedesaan, tetapi lebih ditekankan untuk mengejar program swasembada beras. Para petani dipaksa untuk memproduksi beras sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan terabaikan. Hipotesis Lubis adalah bahwa dalam pembangunan pertanian, selain mempertimbangkan variabel ekonomi, perlu pula mempertimbangkan variabel non-ekonomi, sebab variabel non-ekonomi memainkan peranan yang sangat nyata dalam perkembangan ekonomi. Masalah sosial budaya diduga sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi pedesaan.

Selanjutnya, Soetrisno (1983) mengemukakan bahwa masyarakat petani di pedesaan terus mengalami perubahan ke arah suatu masyarakat yang semakin tertutup, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun sistem pengelolaan pertaniannya. Terjadinya perubahan-perubahan itu merupakan hasil interaksi yang terus menerus dengan masyarakat lain terutama dengan masyarakat serta institusi yang telah mengeksploitasi mereka. Hal demikian menyebabkan semakin sulitnya sebagian besar masyarakat pedesaan yang terdiri atas petani dan peternak miskin untuk berpartisipasi dalam sistem perekonomian maupun dalam sistem produksi pertanian yang diintroduksi dari luar.

Dalam pengamatan Scott (1993) sebagai orang yang banyak mengkaji masyarakat petani di pedesaan negara-negara berkembang, kondisi-kondisi seperti digambarkan di atas yang menyebabkan keterpurukan para petani di desa, jika dibiarkan akan menumbuhkan jiwa perlawanan secara tidak langsung. Misalnya terhadap program atau kebijakan pemerintah, jika mereka telah pernah merasa diperlakukan tidak adil dan perlakuan tersebut berulang-ulang, maka mereka akan menjadi masyarakat yang apatis dan tidak peduli terhadap apa saja yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, Scott (1994) mengemukakan bahwa adanya deraan yang terus menerus terhadap masyarakat tani di pedesaan yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial

Belanda telah menciptakan situasi subsistensi dengan moral ekonominya yang khas. Moral ekonomi “*risk averse*” atau takut menanggung resiko, dan “*safety first*” atau dahulukan selamat, menjadi penyebab masyarakat pedesaan selalu terkungkung dalam kemiskinan. Sebab yang penting bagi mereka bagaimana caranya dapat menafkahi keluarga agar hari ini dapat makan, bukan berusaha meningkatkan hasil usahatani dan usaha ternak mereka. Pada benak mereka, meningkatkan usaha berarti perlu pengorbanan yang dirasakan terlalu berat, dan jika menemui kegagalan maka akan merupakan bencana bagi seluruh keluarganya.

BAB IV

RELASI KEKUASAAN ANTARA MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Twikromo (1993) ada persepsi dari masyarakat kota yang dianggap modern, tentang etos kerja masyarakat pedesaan yang dikategorikan “inferior”. Misalnya sebagai masyarakat yang tidak efisien, malas, tidak teratur, tidak tepat waktu, sulit dipahami, tidak mau bekerja sama, dan selalu berpandangan ke masa lalu. Penilaian rendah terhadap etos kerja masyarakat pedesaan pada gilirannya berubah menjadi mitos, dan dengan tumbuhnya mitos seperti ini, posisi masyarakat pedesaan menjadi lemah sehingga setiap kegagalan pembangunan atau kesalahan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah selalu ditimpakan pada masyarakat pedesaan.

Dari uraian yang ditulis sebelumnya tersirat, bahwa dalam relasi kekuasaan, masyarakat pedesaan berada pada posisi yang tidak punya kekuasaan dan tidak berdaya, sementara yang selalu berposisi sebagai penguasa antara lain masyarakat kota, ekonomi perkotaan, lembaga perdagangan kota, budaya urban, serta institusi pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan birokrasi. Kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan prasangka, nampak sangat berpengaruh terhadap pengukuhan posisi petani peternak di

pedesaan sebagai masyarakat yang tidak berdaya serta tidak memiliki kekuasaan. Mereka juga bisa dikatakan tidak pernah memiliki kekuatan tawar menawar untuk mengubah kondisi ketidakberdayaannya.

Ketidakberdayaan dan ketidakasaan masyarakat pedesaan untuk mengubah tekanan kekuasaan eksternal, secara historis telah terbentuk sejak zaman feodal. Adanya kepentingan-kepentingan ekonomi dari masyarakat feodal kota, yang dikuatkan melalui saluran-saluran politik dengan sanksi-sanksi tertentu telah menimbulkan rasa takut, yang dimanifestasikan dengan kepatuhan sebagai upaya untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang berpotensi akan dihadapinya.

Sementara itu, menurut Kartodirdjo (1979) ada kecenderungan dari penguasa untuk mempertahankan kedudukannya dalam struktur sosial dan nilai-nilai yang mendasari kepentingannya. Misalnya, dalam pola organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat, sering ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dari orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun institusi-institusi yang terlibat di dalamnya. Penyebab dari hal ini diduga karena keterlibatannya tidak didasari oleh motivasi dan komitmen yang kuat untuk menyejahterakan rakyat, namun lebih dilandasi oleh kepentingan-kepentingan individual maupun kelompoknya, serta dalam rangka melegitimasi kekuasaannya. Di sisi lain,

masyarakat petani peternak yang dalam posisi tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan akan makin terjerembab ke dalam kedudukan yang semakin sulit, sehingga tidak bisa ke luar dari kungkungan sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan.

Terjadinya pergantian penguasa dari era feodalisme, kolonialisme dan kapitalisme penjajah, dan bahkan setelah zaman kemerdekaan pada era pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, rupa-rupanya tidak mengubah posisi petani peternak sebagai masyarakat yang tidak punya kekuasaan. Cara pengukuhan kekuasaan cenderung semakin kompleks, terutama pada masa pemerintahan Soeharto, yang sering dianggap hanya menempatkan masyarakat pedesaan sebagai obyek pembangunan semata.

Dalam konteks ini, Tjondronegoro (1990) mengemukakan bahwa kepentingan-kepentingan politik pemerintah Soeharto, sering dengan sengaja diarahkan untuk mempertahankan prinsip “massa mengambang”. Hal demikian telah berpengaruh terhadap ketakutan masyarakat pedesaan untuk berorganisasi sehingga potensi masyarakat desa tidak terlatih untuk mengembangkan dan menolong dirinya sendiri.

Tepat pula kiranya apa yang digambarkan oleh Kartodirdjo (1979), bahwa pada akhirnya masyarakat pedesaan paling tidak memiliki dua sindrom, yaitu sindrom kemiskinan

dan sindrom inersia yang saling kait mengait. Sindrom inersia yang antara lain berupa pasivisme, fatalisme, berorientasi ke dalam (lokalit), patuh “buta”, penuh ketergantungan, dan *nrimo*, merupakan gambaran yang terbentuk sebagai dampak dari adanya intervensi kekuatan eksternal.

BAB V

PETANI PETERNAK SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN

Adanya persepsi terhadap masyarakat pedesaan yang memiliki sindrom inersia seperti yang digambarkan Kartodirdjo menyebabkan kesalahpahaman dalam menerapkan kebijakan pemerintah, yang terefleksi dengan selalu dijadikannya masyarakat pedesaan sebagai obyek pembangunan, bukannya sebagai subyek. Kesalahpahaman secara terus menerus telah menyebabkan tidak adanya perubahan posisi masyarakat pedesaan sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Hal ini telah menyebabkan mereka semakin apatis serta kehilangan semangat kerja.

Sikap yang semakin melekat pada masyarakat pedesaan seperti para petani peternak yang banyak berdiam di pedesaan, menurut Ellis merupakan hambatan budaya yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan sosial. Dalam hal ini, kemiskinan sosial merupakan suatu konsep dari ketiadaan akses masyarakat terhadap berbagai jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk meraih kesempatan-kesempatan guna meningkatkan produktivitasnya (lihat Effendi, 1993).

Menempatkan masyarakat pedesaan pada posisi sebagai subyek pembangunan, menurut pendirian Twikromo

(1993) pada akhirnya dapat melahirkan semangat kerja, baik religi maupun fungsi-fungsi ekonominya. Diharapkan pula, mereka dapat menjadi kritis terhadap berbagai tekanan kekuasaan sehingga dapat beranjak dari posisi mereka sebagai masyarakat yang tidak berdaya dan tidak punya kekuasaan ke arah posisi yang lebih baik. Namun, sangat perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat pedesaan merupakan proses yang harus dijalankan oleh masyarakatnya sendiri, serta dipadukan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberdayaan mereka.

Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan revolusi hijau yang telah dimulai lebih dari empat dekade yang lalu, dapat dijadikan sandaran untuk mengkaji penerapan pembangunan pedesaan. Telah cukup kiranya para petani di pedesaan berpartisipasi untuk menopang swasembada pangan yang pernah dicapai, serta program-program pemerintah lainnya. Namun menurut sementara tulisan dan hasil-hasil penelitian, kebijakan-kebijakan pemerintah yang pernah diimplementasikan kurang memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf ekonomi keluarga petani peternak. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pedesaan telah banyak berpartisipasi dalam pembangunan melalui proyek-proyek padat karya, dengan menyediakan tenaga yang dibayar murah, sehingga mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah.

Revolusi hijau, proyek padat karya, serta kebijakan-kebijakan pembangunan pedesaan lainnya yang pernah diterapkan, hanya sebagian alternatif dari beberapa pilihan pola-pola pembangunan, di samping masih banyak alternatif lain yang bisa diterapkan. Dewasa ini sudah saatnya untuk lebih mengembangkan pola-pola pembangunan yang berdampak langsung terhadap perbaikan hidup masyarakat pedesaan yang sebagian besar terdiri atas para petani juga peternak. Dengan kata lain, perlu upaya untuk lebih mengedepankan pola-pola pembangunan yang menempatkan petani peternak sebagai subyek pembangunan.

Kecermatan dalam perencanaan tentu saja harus tetap diutamakan, namun tidak berarti perlu berlama-lama. Kajian komparasi dengan pembangunan di negara lain, juga perlu dilakukan, agar kita bisa lebih arif. Sebuah fenomena yang terjadi di negara Jepang yang berkaitan dengan pembangunan pertanian dan masyarakat pedesaan menunjukkan hal yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan negara-negara di Asia lainnya.

Perkembangan ekonomi Jepang yang sangat pesat telah berpengaruh signifikan terhadap perokomian pedesaan. Pendapatan petani meningkat dan setaraf dengan pekerja di sektor lainnya. Pendidikan anak-anak petani semakin baik, kelengkapan alat-alat rumah tangga tidak berbeda dengan

mereka yang tinggal di kota, punya kendaraan, bahkan mereka memiliki waktu untuk melakukan rekreasi.

Namun demikian, akibat perkembangan ekonomi yang sangat cepat, telah terjadi ketidakseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor yang lain. Pemerintah terlalu memfokuskan ke dalam bisnis-bisnis besar, dan pertanian bukan menjadi prioritas utama. Banyak petani yang beralih pekerjaan ke sektor non-pertanian. Persoalan lain, karena pendidikan anak-anak petani semakin bagus, tidak ada lagi yang berkeinginan menjadi petani. Sehingga dapat dikatakan, walaupun petani dan masyarakat pedesaan Jepang semakin sejahtera, yang dihadapi oleh pemerintah Jepang adalah kondisi pertanian yang menjadi semakin suram di masa depan.

Dalam konteks menempatkan petani peternak sebagai subyek pembangunan, tentu bukan seperti yang terjadi di Jepang yang diinginkan. Jika memungkinkan, para petani peternak kesejahteraannya meningkat, tetapi sektor pertanian termasuk di dalamnya sektor peternakan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diantara pola pembangunan yang dapat langsung menyentuh masyarakat kecil termasuk petani peternak yang sebagian besar berada di pedesaan, ialah pembangunan pertanian dan peternakan yang dapat memacu tumbuhnya kesempatan kerja non-farm. Dengan tumbuhnya kegiatan non-farm diharapkan dapat lebih memberi kegairahan kehidupan ekonomi di wilayah pedesaan (Effendi, 1990).

Diusulkan pula oleh Baharsjah (1990) untuk mengembangkan agroindustri berskala kecil di pedesaan, dari pada mengembangkan agroindustri berskala besar. Agroindustri berskala kecil ini, selain sangat mendukung terhadap perkembangan usaha tani dan usaha ternak, juga akan sangat berperan dalam menyerap angkatan kerja di pedesaan. Dengan demikian, diharapkan berdampak langsung pada perbaikan taraf perkonomian masyarakat pedesaan.

Pembangunan yang menempatkan petani peternak di pedesaan sebagai subyek pembangunan, pada gilirannya diharapkan akan dapat mengangkat mereka dari belenggu ketidakberdayaan dan kemiskinan yang selama ini melilit kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu, dengan menempatkan petani peternak serta pada umumnya masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan, pada gilirannya bisa

meningkatkan keberdayaan mereka, serta lebih kritis terhadap tekanan-tekanan kekuasaan.

Namun untuk mendukung hal di atas, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari pemegang kekuasaan terhadap aspek non-ekonomi seperti kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan termasuk di dalamnya para petani peternak, sebab aspek sosial budaya ini berkaitan erat dengan aspek perekonomian di pedesaan (Lubis, 1990). Dengan demikian, diharapkan akan lebih mempermudah upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, dan pada akhirnya akan sangat berpotensi untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2001. *Karakteristik Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2000*, Seri L2.2.11.11. Bandung: Badan Pusat Statistika Jawa Barat.
- Baharsjah, Sjarifudin. 1990. "Peluang Usaha Tetap Luas di Sektor Pertanian", *Prisma* 19(2): 86-93.
- Deliveri. 1998. "Pengembangan Agribisnis Mandiri", *Newsletter*, Issue No. 6, April 1998.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1990. *The Growth of Rural Non-Farm Activities at Local Level: A Case Study of Causes and Effect in Subdistrict of Upland Central Java*. Adelaide: The Flinders University of South Australia. Thesis Ph.D.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fukutake, Tadashi. 1989. *Masyarakat Pedesaan di Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Hewitt, Martin. 1991. "Bio-politics and Social Policy: Foucault's Account of Welfare", dalam Mike Featherstone, Mike Hepworth, and Bryan Turner (ed.). *No Title*. London: Sage.
- Kartodirdjo, Sartono. 1979. "Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan", *Prisma* 8(6): 3-11.
- Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bintang Intervisi Utama.
- Long, Norman. 1992. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Bina Aksara.

- Lubis, Alfian. 1990. "Kebijakan Pemerintah Bukan untuk Membina Mereka", *Prisma* 19(2): 101-106.
- Mubyarto. 1990. "Pembangunan Pertanian: Korban dari Bias Arus Utama", *Prisma*, 19(2): 98-100.
- Ritzer, George. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, James C. 1994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Setiawan, Nugraha. 2002. "Angkatan Kerja dan Pengangguran di Pedesaan: Analisis Hasil Sakernas", *Jurnal Kependudukan* 4(1): 61-74.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetrisno, Loekman. 1983. "Dinamika Masyarakat Pedesaan", *Basis* 22(5): 167-171.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1990. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan", *Prisma*, 19(2): 3-14.
- Twikromo, Argo. 1993. "Mitos tentang Etos Kerja Masyarakat Pedesaan", *Basis* 42(10): 391-394.
- Veeger, Karel J. dkk. 1992. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.
- Yunasaf, Unang; Nugraha Setiawan; Lilis Nurlina. 1998. *Hubungan Keterbukaan Petani Peternak Terhadap Nilai Kemodernan dengan Tingkat Penerapan Sistem Agribisnis*. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.